BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 merupakan satu kebijakan yang efektif dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan didasarkan pada data jumlah narapidana terkonfirmasi terpapar Covid-19 yang relatif rendah serta tidak berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi itu sendiri yaitu bahwa narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat.
2. Pengecualian penerima program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 merupakan tindakan diskriminatif dikarenakan melanggar HAM. Pembinaan narapidana sesuai konsep pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asimilasi adalah hak seluruh narapidana, sehingga adanya pengecualian penerima asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bertentangan dengan konsep pemasyarakatan. Dalam hal pemenuhan hak bagi seluruh narapidana berdasarkan tujuan pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, penulis setuju bahwa asimilasi seharusnya diberikan kepada seluruh narapidana, baik narapidana pelaku tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan narapidana melalui program asimilasi pada masa pandemi adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 sebagai upaya pemenuhan hak asasi

manusia bagi narapidana berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Oleh karenanya pemberlakuan kebijakan tersebut perlu terus dilaksanakan selama penetapan status pandemi masih diberlakukan oleh pemerintah.

2. Perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, terutama pada pasal-pasal pengecualian penerima asimilasi terhadap narapidana pelaku tindak pidana tertentu. Sehingga semua narapidana memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama sehingga terpenuhi rasa keadilan untuk mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 dengan tetap memperhatikan syarat secara substantif dan administratif serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga. Model persuasif edukatif dapat dilakukan dengan cara pendekatan konten spesifik, dan pendekatan konten secara obyektif.